

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Bali. (2012, Juli 14). *PAD Denpasar Naik Rp65 Miliar*. Diambil kembali dari AntaraBali.com: <http://www.antarabali.com/berita/24977/pad-denpasar-naik-rp65-miliar>
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2016). *Badan Pusat Statistik Kota Bandung*. Dipetik Juli 25, 2016, dari BPS Kota Bandung: <https://bandungkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/10>
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2016). *Luas Wilayah Menurut Kecamatan (KM2), 2008-2014*. Dipetik September 8, 2016, dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung: <https://bandungkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/11>
- Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2016). *Jumlah Rumah Tangga, Rata-rata Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kota Denpasar, 2014*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kota Denpasar: <http://denpasarkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/200>
- Bagijo, H. E. (2011). Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi di Jawa Timur). *Perspektif*, 16(1), 12-29.
- Bamber, L. S., Braun, K. W., & Harrison, W. T. (2008). *Managerial Accounting*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- BPS-Statistics Indonesia. (2016). *Banyaknya Rumah Tangga menurut Provinsi, 2000-2014*. Dipetik March 12, 2016, dari Badan Pusat Statistik: <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/851>
- BPS-Statistics Indonesia. (2016). *Perkiraan Penduduk Beberapa Negara, 2000-2014*. Dipetik March 12, 2016, dari Badan Pusat Statistik: <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960>
- Central Intelligence Agency. (2015, July). *The World Factbook*. Diambil kembali dari Central Intelligence Agency Web site: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html>
- Darnita, C. D., & Mangoting, Y. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Kota Palangkaraya. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1-10.
- Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. (2014). *Realisasi Pendapatan Murni Tahun 2012 dan 2013. LAKIP Dinas Pelayanan Pajak Bandung Tahun 2013*, hal. Lampiran IV.

- Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. (2015). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2014. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2014*, hal. 27.
- Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar. (2016). *Struktur Organisasi*. Dipetik Maret 21, 2016, dari Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar: [http://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/CKImages/files/Doc11\(1\).pdf](http://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/CKImages/files/Doc11(1).pdf)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012, April 14). *Belajar Pajak*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan: <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012, December 5). *Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah*. Dipetik March 12, 2016, dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan: <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan>
- Ekawati, M. S. (2013). Studi Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser. *eJournal Administrasi Negara*, 1(1), 282-293.
- Fawzia, A. (2009, November 9). *Seputar Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. Dipetik March 13, 2016, dari Detik Finance: <http://finance.detik.com/read/2009/11/09/085934/1237796/690/seputar-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jaya, G. P., & Widanta, A. P. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(5), 201-208.
- Kabarbisnis. (2010, Desember 2). *Pungut BPHTB & PBB-P2, PAD Surabaya naik 2 kali lipat*. Diambil kembali dari Kabar Bisnis Web site: <http://kabarbisnis.com/read/2816481>
- Karlöf, B., & Ösblom, S. (1997). *Benchmarking: Petunjuk Menuju Keunggulan*. (B. Rahardjo, Penerj.) Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kementrian Dalam Negeri. (2013). *Kabupaten Kota Denpasar*. Dipetik Mei 29, 2016, dari kemendagri.go.id: <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/51/name/bali/detail/5171/kota-denpasar>

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2010, Desember). PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah. *Media Keuangan*, V(40), hal. 8. Dipetik Maret 27, 2016, dari <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/media%20keuangan/Media%20Keuangan%20Desember%202010/HTML/index.html#/8/zoomed>
- Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.* (Jakarta). 1996: Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kosasih, Maria, E., & Yusuf, A. (2012, November). Analisis Sistem Pajak BPHTB dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Karawang. *Majalah Ilmiah Solusi Unsika*, 11(24), 1-10.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Manajemen Situs Kemenkeu. (2016). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015*. Dipetik March 12, 2016, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://www.kemenkeu.go.id/wide/apbn2015>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujiyati, Safitri, L. A., & Putri, D. K. (2015). Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pasca UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo). *Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper*, 464-469.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak : Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Osblom, S., & Karlöf, B. (1997). *Benchmarking: Petunjuk Menuju Keunggulan*. (B. Rahardjo, Penerj.) Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pemayun, C. N. (2016, January 4). *UMK 2016*. Retrieved from Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Denpasar: http://denpasarkota.go.id/assets_subdomain/40/download/UMK%202016_849350.pdf
- Pemerintah Daerah Kota Bandung. (2013, Mei 10). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun 2013*. Diambil kembali dari Portal Resmi Kota Bandung: <http://portal.bandung.go.id/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah-tahun-2013>
- Pemerintah Daerah Kota Bandung. (2014, April 7). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun 2014*. Diambil kembali dari Portal Resmi Kota Bandung: <http://portal.bandung.go.id/transparansi-pengelolaan-anggaran-daerah-tahun-2014>

- Pemerintah Kabupaten Paser. (2009). *Pengertian & Arti Definisi Pajak Bumi dan Bangunan*. Dipetik March 13, 2016, dari Situs Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser: <http://www.paserkab.go.id/publikasi/661>
- Pemerintah Kota Denpasar. (t.thn.). *Kondisi Geografi*. Dipetik September 8, 2016, dari denpasarkota.go.id: <http://denpasarkota.go.id/index.php/selayang-pandang/2/Kondisi-Geografi>
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar*. (2014). Denpasar: Sekretariat Kota Denpasar.
- PT. Berita Bali Media. (2016, Januari 12). *BPS : Pertumbuhan Ekonomi Bali 6,17 Persen*. Diambil kembali dari BeritaBali.com: <http://beritabali.com/read/2016/01/12/201601120004/BPS--Pertumbuhan-Ekonomi-Bali-617-Persen.html>
- Riadi, M. (2015, June). *Pendapatan Asli Daerah*. Retrieved March 13, 2016, from Kajian Pustaka: <http://www.kajianpustaka.com/2015/06/pendapatan-asli-daerah-pad.html>
- Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sudarwan, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, & Hidayanti, E. (2011). Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP_ dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah, Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal WIGA*, 2(2), 43-49.
- Tax Centre FISIP Universitas Indonesia dan PT Integral Data Prima. (2000, August 2). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000*. Dipetik March 13, 2016, dari Observation and Research of Taxation (Ortax): <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=5>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. (1994). Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*. (2000). Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (2004). Jakarta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004). Jakarta.

Wijaya, I. P., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2014). Pengaruh Desentralisasi Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1-11.